

Kampus Merdeka dan Arah Pendidikan Republik Indonesia

Achmad Resa

Universitas Gadjah Mada
achmadresa@mail.ugm.ac.id

Arum Asyfa Azahra

Universitas Gadjah Mada
arumasyfaazahra@mail.ugm.ac.id

Muhammad Hasyim Romadani

Universitas Gadjah Mada
danyyot01@gmail.com

***Abstract:** This article aims to view the Kampus Merdeka program in a critical view. The Ministry of Education of Republic of Indonesia announced this program on 2020. This program tends to give more freedom for universities and students in their educational progress and purposes. One of the most important goals of this program is to graduate alumni who are ready to face the working field as the alumni of the universities nowadays do not link and match with the job demands. Despite the drawbacks of this concept, there are some benefits can be obtained from this program but with some criticism in it. This research is based on library research which analyses the relevant books and articles. It can be concluded that Kampus Merdeka is potential for developing multidisciplinary studies and maximizing the process of learning in universities. It must be noted too that the main goal of education should not be neglected; it is to produce a good man. Only after fulfilling this main goal, the Kampus Merdeka program will benefit us more comprehensively.*

Keywords: Pendidikan; tujuan; manusia

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan bangsa tersebut. Masyarakat sebagai kumpulan individu yang menyusun suatu negara merupakan produk dari proses pendidikan yang disediakan oleh negara. Keseriusan pemerintah dalam menyusun rangkaian program pendidikan menjadi faktor penentu maju tidaknya suatu bangsa. Seiring dengan zaman yang terus berkembang, pendidikan juga diharapkan mampu menjadi sarana dalam menjawab perkembangan zaman. Pendidikan juga memainkan peranan penting dalam merespon perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi, terlebih dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 seperti saat ini. Persaingan teknologi, ekonomi, sosial dan politik dalam era ini menuntut suatu sistem pendidikan yang mampu

melahirkan sumber daya manusia yang dapat beradaptasi dengan dunia yang terus berkembang.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini, khususnya terkait pendidikan tinggi, yaitu sekitar 80% alumni perguruan tinggi tidak bekerja sesuai dengan program studinya (Fatiara & Utomo, 2021). Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim dalam kunjungannya ke Universitas Sumatera Utara pada 2021 silam. Pada kesempatan itu, Nadiem mengemukakan program Merdeka Belajar. Dengan program Merdeka Belajar, alumni perguruan tinggi diharapkan akan memiliki berbagai pengetahuan di berbagai bidang studi. Permasalahan lainnya terkait dunia kerja yang dihadapi oleh alumni perguruan tinggi

adalah tingginya angka pengangguran. 11, 43% dari pengangguran adalah lulusan sarjan dan diploma. Angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan lulusan sekolah menengah atas kebawah. Hal ini disebabkan karena *miss link and match*. Dengan adanya program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, diharapkan kedua permasalahan ini, ketaksesuaian program studi dengan lapangan kerja dan pengangguran, dapat berkurang.

Sebagai sebuah terobosan untuk meningkatkan kesesuaian alumni perguruan tinggi dan upaya mengurangi angka pengangguran, program Kampus Merdeka patut diapresiasi. Akan tetapi, kehadiran program ini tidak tanpa kritik. Kampus Merdeka secara eksplisit ditujukan agar alumni perguruan tinggi dapat menyesuaikan diri dengan dunia industri, dunia kerja, dan masa depan yang berubah dengan cepat. Logika yang dibangun dari tujuan ini pada akhirnya adalah pemenuhan sektor industri. Alumni perguruan tinggi kemudian diproyeksikan dapat memenuhi dunia kerja dan sektor industri sesuai dengan program studinya, atau dapat disebut dengan *link and match*. Dengan ini, program Kampus Merdeka sarat akan industrialisasi dan kapitalisasi pendidikan. Jika perguruan tinggi ditujukan hanya untuk mencapai tujuan ini, maka ia telah dikerdilkan dari tujuan asal pendidikan yaitu memanusiaikan manusia. Untuk konteks Indonesia, pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk melahirkan manusia Pancasila. Manusia Pancasila adalah manusia yang sesuai dengan kelima sila yang terkandung di dalamnya. Jika mencetak manusia Pancasila tidak dijadikan orientasi utama dalam pendidikan Republik Indonesia, maka Pancasila hanya sebuah slogan kosong tanpa makna. Pancasila seharusnya terinternalisasi dalam individu setiap rakyat Indonesia. Dan ini diaktualisasikan melalui pendidikan sebagai *ideological state apparatuses*. Oleh karenanya, program

Kampus Merdeka perlu untuk ditinjau ulang dan dikawal agar tidak terjadi deviasi pada orientasi pendidikan Republik Indonesia.

METODE

Tulisan ini merupakan suatu kajian terhadap kebijakan pemerintah. Sumber utama penelitian ini adalah naskah akademik berupa peraturan dari kementerian dan undang-undang. Selain itu berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal artikel, dan web juga dikumpulkan dan dianalisis. Melalui analisis terhadap teks-teks di muka, diharapkan dapat diperoleh suatu refleksi filosofis terkait konsep Kampus Merdeka. Berdasarkan metode ini, penelitian ini merupakan suatu penelitian berbasis kepustakaan (*library research*) (Bakker & Zubair, 1990; Kaelan, 2005)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan telaah atas beberapa naskah yang menjadi landasan hukum kampus merdeka, buku saku Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, beserta beberapa teks akademik terkait, terdapat beberapa hasil:

1. Program Kampus Merdeka, khususnya program magang, merupakan suatu terobosan baru dalam memenuhi kebutuhan Indonesia, utamanya dalam menghadapi dunia yang *ever-changes*. Namun, dari sini timbul masalah baru, yaitu orientasi pendidikan yang lebih fokus dalam menciptakan pekerja dibanding menciptakan manusia. Dengan ini, pendidikan hanya menjadi pelayan bagi korporasi. Olehnya, program ini sarat akan kepentingan neoliberalisme.
2. Kelonggaran untuk menjadi PTN-BH sangat rentan akan kesemena-menaan perguruan tinggi terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan, khususnya kebijakan terkait keuangan.

3. Kebijakan mengambil SKS di luar program studi atau perguruan tinggi merupakan peluang bagi terwujudnya *interdisciplinary studies*. Sayangnya, belum ada panduan khusus terkait program studi yang bisa diambil oleh para mahasiswa dan juga kompetensi dasar tertentu untuk mengambil SKS di program studi atau di perguruan tinggi lain. Perlu mempertimbangkan jembatan epistemologis antar-program studi agar kegiatan ini tidak hanya pengumpulan informasi dari program studi lain tanpa mengetahui keterkaitannya dengan program studi yang diambil oleh mahasiswa di kampus utamanya.
4. Program ini perlu ditinjau ulang guna. Pemenuhan kebutuhan industri tidak dapat dielakkan menjadi salah satu *output* perguruan tinggi. Namun, sebelum mampu memenuhi tujuan tersebut, kiranya perlu menilik kembali apa tujuan utama dari pendidikan. Pendidikan haruslah dimaksudkan untuk menciptakan manusia yang baik terlebih dahulu. Apabila tujuan itu telah terpenuhi, lapangan pekerjaan tidak hanya dipenuhi oleh pegawai yang baik, melainkan juga manusia-manusia yang arif.

Pembahasan

Di zaman kontemporer ini, kebutuhan manusia dalam berbagai aspek kehidupan semakin beragam. Kompleksitas yang terjadi kian memasuki dunia pendidikan dan dunia kerja. Terlebih lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, seakan menuntut manusia untuk turut mengikuti jejak langkahnya. Kendati dunia telah berubah dan memaksa kita untuk memahaminya, manusia tetap memiliki kendali penuh atas apa yang terjadi pada perubahan sosial yang terus bergulir. Meskipun manusia adalah subjek utama dalam memutuskan segala sesuatu, namun

agaknyanya untuk menyelesaikan beberapa persoalan kehidupan sangat memerlukan bantuan teknologi. Dalam perjalanannya, manusia seperti diharuskan untuk memiliki kemampuan yang cepat dalam menangkap fungsi teknologi karena kehidupan saat ini tidak pernah lepas dari peran teknologi. Semakin mendesaknya tuntutan dalam dunia kerja dan industri dengan mewajibkan calon pelamar memiliki kemampuan tertentu, maka hal ini memiliki dampak yang sangat besar bagi dunia pendidikan, khususnya ruang lingkup universitas.

Dengan kondisi seperti ini, pemerintah turut serta menciptakan sistem pendidikan yang berbeda dari sebelumnya. Atas dasar meningkatnya kebutuhan para calon lulusan dalam mencari pekerjaan, kemudian perubahan sosial budaya yang begitu cepat, dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, pemerintah pun membuat terobosan baru melalui program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek sebagai sebuah solusi dalam memenuhi harapan para mahasiswa untuk dapat bersaing di dunia global. Program-program yang termuat dalam kebijakan Kampus Merdeka dipastikan akan memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa sekaligus menjadi sarana pengembangan kompetensi. Kebijakan ini menitikberatkan pada upaya mendorong mahasiswa untuk memperdalam dan menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya. Sehingga, melalui program ini diharapkan mahasiswa dapat lebih percaya diri ketika memasuki dunia kerja dan industri pasca kelulusan.

Program utama MBKM adalah kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester mahasiswa di luar program studi (Apriliyani, Hernawan, Purnamasari, Seran,

& Sastrawan, 2022), mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang dimaksud berupa satu semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan dua semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Pemerintah memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi diri dengan memilih program apapun yang sudah disediakan oleh Kampus Merdeka. Melalui program tersebut, mahasiswa dapat mencari pengalaman berdasarkan kebutuhan yang akan disiapkan untuk karir kedepannya. Pemerintah tidak hanya membantu mengembangkan potensi mahasiswa melalui pembuatan program saja, tetapi tenaga didik atau dosen, lembaga, institusi, perusahaan yang dibutuhkan sebagai sarana pencapaian dalam pengembangan potensi turut dipersiapkan. Tentunya persiapan ini diupayakan untuk tetap menjaga kualitas dan stabilitas ketika Kampus Merdeka sudah dijalankan agar berjalan sesuai dengan harapan.

Berdasarkan tujuannya, Kampus Merdeka yang kini mendapat perhatian khusus oleh pemerintah sangat berfokus pada upaya meningkatkan kemampuan yang dimiliki calon lulusan. Adapun kemampuan atau kompetensi ini bukan hanya memusatkan pada soft skills saja, tetapi juga pada hard skills. Pemerintah membuat kebijakan melalui Kampus Merdeka agar mereka yang akan lulus dari jenjang universitas dapat lebih siap ketika terjun ke dunia kerja atau industri dengan dilengkapi pengalaman serta kemampuan sesuai kebutuhan zaman. Sistem dari Kampus Merdeka yang menciptakan perguruan tinggi lebih otonom dan fleksibel akan membangun kultur belajar yang lebih inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Sehingga, inovasi, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi akan lebih

meningkat karena mahasiswa sebagai pusat pembelajarannya. Kampus Merdeka juga tidak hanya memusatkan pada pengembangan kemampuan yang dimiliki oleh para calon lulusan, tetapi tujuan lainnya adalah turut serta menanamkan nilai-nilai Pancasila yang akan membentuk kepribadian serta membangun jiwa kepemimpinan yang lebih baik. Berdasarkan tujuannya, diharapkan program Kampus Merdeka dapat menjadi jawaban dari keresahan yang dialami oleh mahasiswa ketika akan menghadapi kehidupan pasca kelulusan.

Jenis kegiatan pertama dari program Kampus Merdeka adalah Magang Bersertifikat. Salah satu cara untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam mencari pengalaman adalah dengan diadakannya kegiatan magang. Program ini setidaknya memberikan gambaran bagaimana sistematis dan suasana dunia kerja. Mengingat bahwa hampir seluruh perusahaan atau industri selalu membuka lowongan kerja berdasarkan pengalaman, maka diharapkan program magang dapat membantu mahasiswa untuk menciptakan pengalaman baru yang nantinya akan diapresiasi melalui sertifikat. Rentang waktu untuk kegiatan magang berkisar antara satu sampai dua semester dengan parameter pencapaiannya yaitu memperdalam kemampuan soft skills dan hard skills agar para lulusan mampu beradaptasi dan bersaing dalam dunia kerja.

Kedua, studi independen. Banyaknya mahasiswa di Indonesia serta beragamnya minat dan bakat yang dimilikinya, pemerintah mengadakan program studi independen sebagai ruang bagi mereka yang ingin mengembangkan kemampuannya secara mandiri. Kreativitas dan inovatif mahasiswa diberdayakan secara maksimal melalui riset dan pengembangan (RAD) yang disalurkan pada ajang nasional maupun internasional.

Selanjutnya ada program Kampus Mengajar. Kegiatan yang dilakukan pada program kampus mengajar adalah mahasiswa diberi peluang untuk menjadi guru di satuan pendidikan tertentu. Salah satu persoalan di Indonesia adalah tidak meratanya penyaluran pendidikan di berbagai daerah, maka program ini menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang setara serta menjadi ajang bagi mahasiswa untuk memperdalam minat dan bakatnya di dunia pendidikan.

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan bertaraf internasional, yaitu Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA). IISMA merupakan beasiswa dari pemerintah yang mendanai mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas luar negeri. Selain fokus utamanya belajar, mahasiswa diharapkan dapat menjalin relasi lebih luas bersama mahasiswa internasional dan mengenali budaya luar negeri yang nantinya akan menjadi acuan untuk membantu mencapai karir mahasiswa. Untuk program dengan cakupan yang lebih luas, pemerintah menyediakan program pertukaran pelajar. Program pertukaran mahasiswa bukan hanya lintas kampus luar negeri saja, tetapi dapat dilakukan di dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dan juga memperkuat tali persaudaraan bagi seluruh pelajar di Indonesia. Sehingga, mahasiswa dapat mempelajari dan memahami kultur belajar di tempat yang berbeda.

Lebih lanjut, sebagai upaya dan realisasi pembangunan desa, pemerintah juga menyediakan Program membangun desa atau KKN Tematik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat belajar diluar lingkungan kampus dan ingin bersosialisasi langsung bersama warga desa dapat mengikuti program membangun desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). Pada praktiknya, mahasiswa akan belajar bagaimana mengidentifikasi masalah yang ada di sebuah

desa dan turut membantu memberikan solusi. Program ini bukan hanya bermanfaat bagi warga setempat, tetapi meningkatkan potensi leadership, soft skills dan kemampuan komunikasi yang baik.

Kegiatan selanjutnya adalah proyek kemanusiaan. Negara Indonesia yang sering kali terjadi bencana alam sangat memerlukan program kemanusiaan dalam upaya membantu menyelamatkan korban. Tujuan utama dari adanya proyek kemanusiaan adalah menumbuhkan rasa kemanusiaan itu sendiri yang didasari oleh nilai-nilai agama, moral, dan etika.

Kampus Merdeka juga memiliki program riset guna pengembangan ilmu pengetahuan. Program Kampus Merdeka memfasilitasi para mahasiswa yang senang meneliti dan melakukan riset untuk segera mengembangkan kompetensinya. Penelitian dapat dilakukan di lembaga riset atau pusat studi agar mahasiswa lebih fokus dalam meningkatkan mutu riset yang ada di laboratorium. Selain itu, tujuan dari program ini adalah pemerintah ingin menciptakan generasi baru yang nantinya akan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas riset di lembaga-lembaga Indonesia.

Dan yang terakhir, ada program wirausaha. Meningkatnya minat pelajar mahasiswa dalam menekuni wirausaha membuat pemerintah merasa bahwa penting untuk menciptakan program kewirausahaan. Hal ini bertujuan untuk membimbing mahasiswa supaya dapat mengetahui lebih dalam dunia wirausaha dan tentunya sebagai salah satu cara mengurangi pengangguran pasca lulus kuliah.

Program-program Kampus Merdeka yang telah dideskripsikan di atas sarat akan logika industri. Berbicara perihal logika industri berarti membahas tentang bagaimana cara berpikir yang tepat untuk mendapatkan keuntungan dan bertahan dalam sirkulasi ekonomi. Cara berpikir seperti ini tentu saja dipraktikkan dalam dunia bisnis. Tujuannya

adalah menaikkan penjualan dan penghasilan. Pandangan seperti ini berbeda dengan cara pikir dan tujuan ilmu pengetahuan yang dilakukan untuk mencapai kebaikan, kebenaran, dan kesejahteraan atau untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan berkaitan dengan pencarian dan pemaknaan hidup, tidak terbatas pada pencarian keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi bagaimana bila cara pandang luhur ilmu pengetahuan bertemu dengan logika industri? Pertanyaan tersebut bisa kita ajukan dalam fenomena Kampus Merdeka yang merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia (Kemendikbudristek) di lingkungan kampus. Kebijakan yang memuat logika industri semakin nampak di lingkungan pengetahuan. Karena kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapan para mahasiswa di dunia pekerjaan dan bertahan di lingkungan industri. Kebijakan tersebut merubah dasar kebebasan pendidikan ke arah kapitalisasi pendidikan, transformasi dari liberalisme ke neoliberalisme.

Liberalisme pendidikan di Indonesia adalah upaya untuk menghadirkan kebebasan individu dalam meningkatnya pengetahuan, bakat, dan minat. Tindakan yang dilakukan dalam memberikan pilihan bebas terhadap masyarakat, tanpa adanya intervensi negara pada kebebasan sipil. Pemerintah di sini berfungsi untuk menyediakan pendidikan dengan prinsip kebebasan ini mampu berjalan dengan baik. Pandangan ini tentunya sejalan dengan filosofi pendidikan yang dipahami oleh pemikir-pemikir besar dunia. John Locke misalnya yang memahami pendidikan sebagai tempat setiap individu dilatih menggunakan kebebasan yang dimilikinya. Pendidikan memberikan dasar moral dan juga intelektual untuk membangun kebebasan setiap individu. Rousseau juga memiliki keyakinan yang sama, bahwa pendidikan perlu mengembangkan

kemampuan alami anak, membuat mereka melakukan pencariannya sendiri. Pendidikan menumbuhkan kemandirian individu melalui pemberian kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mengenyam pendidikan.

Cita-cita liberalisme kemudian membawa pendidikan mengarah pada liberalisme baru atau biasa kita kenal sebagai neoliberalisme. Penekanan paham ini bukan lagi kebebasan untuk memilih minat, pengembangan kemampuan, serta ilmu pengetahuan, melainkan salah satu penunjang atau pengisi pasar bebas. Akhirnya pendidikan menjadi tempat untuk mencari keuntungan, atau investasi individu untuk memiliki tempat di pasar bebas. Neoliberalisme membuat pendidikan berkompetisi dalam sistem pendidikan yang menghasilkan profit. Kampus merdeka sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang menekankan para siswa untuk bekerjasama dengan pihak industri adalah salah satu bentuk neoliberalisme pendidikan. Keilmuan menjadi pembantu untuk kepentingan dunia kerja. Ilmu pengetahuan dalam pendidikan yang beragam menjadi satu bentuk untuk memenuhi kepentingan pasar. Neoliberalisme kemudian mengkhianati cita-cita kebebasan.

Peran pemerintah dalam kebijakan pendidikan ini memperlihatkan kecurigaan Althusser terhadap praktik sosial kapital dalam suatu negara yang dalam kasus ini melalui pendidikan. Althusser memang tidak menyebut fenomena ini sebagai logika industri dalam pendidikan, namun baginya lembaga pendidikan bertindak sebagai "aparatus ideologis negara" yang berfungsi untuk membentuk dan mengendalikan pola pikir dan perilaku individu (Althusser, 2001). Pendidikan dalam kebijakan Kampus Merdeka memperlihatkan sistem kapitalis yang dimaksudkan Althusser, menghasilkan angkatan kerja yang terdisiplin, siap memasuki dunia industri dan mengisi peran-

peran yang telah ditetapkan dalam struktur sosial dan ekonomi.

Melalui pemahaman Althusser, industrialisasi pendidikan dapat terjadi melalui adopsi sistematis pendekatan yang mengubah pendidikan menjadi proses produksi massal, dengan penekanan pada standarisasi, efisiensi, dan persiapan untuk peran industri tertentu. Industrialisasi pendidikan dapat melibatkan pendekatan kurikulum yang terstruktur, penggunaan metode pengajaran, dan orientasi yang lebih besar pada pelatihan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan yang mengarah pada kesiapan kerja murid, dalam hal ini mahasiswa juga Althusser jelaskan sebagai proses pemenuhan kebutuhan pihak kapitalis. Ada dua hal yang dibutuhkan pemilik modal, yang pertama adalah reproduksi kekuatan produksi, dan yang kedua adalah reproduksi tenaga kerja (Romadona, 2020). Mahasiswa melalui Kampus Merdeka sangat cocok disebut sebagai pihak yang diproduksi sebagai tenaga kerja dalam pemenuhan kebutuhan pihak kapitalis atau yang lebih dikenal sebutan *corporate* belakangan ini.

Kampus merdeka juga semakin menunjukkan bahwa zaman di mana kapitalisme melahap dan menentang semua cara pandang yang menentangnya memang tidak bisa dipungkiri. Kebijakan yang menunjukkan praktik realisme kapitalis tersebut dilakukan secara terang-terangan. Kasus semacam ini memang bukan hal yang baru, empat belas tahun yang lalu Mark Fisher, seorang teoretikus budaya dan penulis buku "Capitalist Realism: Is There No Alternative?" (2009) telah menjelaskannya. Fisher mengajukan gagasan tentang "realisme kapitalis", ia berpendapat bahwa dalam era pasca perang, kita telah memasuki dunia yang dikuasai oleh logika dan praktik kapitalisme yang sulit dilampaui atau dibayangkan alternatifnya (Fisher, 2009).

Pendidikan dalam realisme kapitalis Fisher mirip dengan pandangan Althusser dilihat sebagai bagian integral dari reproduksi sistem kapitalis. Fisher berpendapat bahwa pendidikan pada umumnya, dan sistem pendidikan yang terorganisir secara institusional khususnya, berfungsi untuk menghasilkan dan mempertahankan "realitas kapitalis" ini. Pendidikan dipandang sebagai alat untuk mengajarkan nilai-nilai dan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan kerja kapitalis, serta menginternalisasikan pola pikir yang sesuai dengan logika ekonomi pasar. Fisher mengkritik pendidikan dalam realisme kapitalis karena menyebabkan kehilangan imajinasi sosial dan alternatif. Ia berpendapat bahwa sistem pendidikan saat ini cenderung membatasi imajinasi dan mempersempit cakrawala kita, sehingga sulit bagi kita untuk membayangkan cara-cara baru untuk mengorganisir masyarakat dan ekonomi di luar logika kapitalis yang mendominasi (Stock, 2023).

Fisher tidak menolak pendidikan sebagai sesuatu yang penting, namun ia menekankan perlunya mengubah pendidikan agar mampu merangsang imajinasi dan memungkinkan munculnya alternatif-alternatif selain realitas kapitalis yang ada. Ia mengajukan gagasan pendidikan yang mendorong pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan untuk membayangkan dunia yang berbeda (Stock, 2023). Fisher berpendapat bahwa perubahan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya untuk mencapai perubahan sosial yang lebih luas. Dalam konteks realisme kapitalis, Fisher mengusulkan agar pendidikan tidak hanya mempersiapkan individu untuk menjadi pekerja yang produktif, tetapi juga untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas yang dapat digunakan untuk

mempertanyakan dan mengubah kondisi sosial yang ada (Stock, 2023).

Mengacu kepada kedua pandangan milik Althusser dan Fisher pemerintah Indonesia melalui kebijakan Indonesia tidak salah lagi menjadi “aparatus ideologis negara” yang membentuk dan terus mempertahankan realisme kapitalis dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang seharusnya mengedepankan sikap kritis dalam berbagai hal di sini justru terlihat pasif mengikuti perkembangan ekonomi global. Kebijakan pendidikan yang seharusnya lebih mengutamakan peran pendidikan dalam menjawab tantangan zaman justru terlibat dalam mempertahankan tersebut. Ruang pendidikan sebagai tempat terbaik dalam menyediakan alternatif berpikir justru menutup opsi baru dalam sistem ekonomi yang stuck. Melalui fenomena ini kita semakin dibuat percaya bahwa lebih mudah membayangkan keruntuhan dunia daripada runtuhnya kapitalisme (Apinino, 2022).

Suatu sistem pendidikan tidak akan dapat lepas dari suatu sistem filsafat (Hutchins, 1952). Meskipun pada tingkatan praktis filsafat yang mendasarinya tidak terlihat dengan jelas, namun sistem filsafat yang menjadi dasar tersebut menjadi penentu arah suatu sistem hingga kurikulum pendidikan tersebut. Plato mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan negara (Noddings, 1995). Maka dari itu, sistem pendidikan yang dibangun di Yunani pada saat itu dibentuk sedemikian rupa sehingga luaran darinya memenuhi kebutuhan negara. Pendirian Plato didasarkan pada konsepnya tentang suatu negara ideal. Dalam suatu negara ideal yang dibayangkan oleh Plato, terdapat berbagai macam tipologi masyarakat. Selain itu, kebutuhan dalam suatu negara juga bermacam-macam. Maka dari itu, setiap masyarakat perlu dididik sesuai dengan bakatnya masing-masing dengan

menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh negara (Plato, 2004).

John Dewey menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah pertumbuhan. Dewey memaksudkan pertumbuhan baik secara biologis maupun secara intelektual. Pertumbuhan secara intelektual dicapai dengan pengalaman untuk dapat menyesuaikan diri dengan kebaikan-kebaikan baik di masa depan. Tujuan ini berkaitan erat dengan aspek sosial. Namun Dewey tidak hanya berhenti sampai di situ. Dewey juga berpendapat bahwa pendidikan harus bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri (Wasitohadi, 2014). Dewey juga menekankan bahwa pendidikan bukan hanya sebagai sarana, melainkan sebagai tujuan (Noddings, 1995).

Eksistensialisme beranggapan bahwa pendidikan ditujukan untuk menemukan makna hidupnya, mengembangkan makna hidupnya, dan bertanggungjawab atas pilihan hidupnya. Para eksistensialis menolak suatu sistem yang dapat mensubordinasi manusia dibawahnya (Noddings, 1995).

Pendidikan agama juga menempati posisi yang cukup penting. Dalam Agama Kristen, pendidikan ditujukan untuk membentuk manusia yang mampu menjalankan perintah Tuhan (Tanduklangi, 2020). Adapun dalam Islam, tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang baik, membentuk akhlak mulia, dan mempersiapkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat (Hasibuan, 2016; Syafe'i, 206M).

Dari sekian banyak perspektif terkait tujuan pendidikan, hal yang paling fundamental adalah mencetak manusia yang baik. Konsep tentang manusia yang baik mendahului warga negara yang baik. Secara otomatis, jika seseorang adalah manusia yang baik, maka ia dapat menjadi warga negara yang baik. Yang menjadi persoalan adalah definisi tentang manusia yang baik. Aristoteles mendefinisikan manusia yang

baik adalah manusia yang berguna bagi negara. Adapun Syed Muhammad Naquib al-Attas mendefinisikan manusia yang baik adalah *man of adab*. *Man of Adab* adalah orang yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tempat di sini tidak hanya merujuk pada tatanan ontologis dunia empiris, melainkan juga pada taraf teologis dan etis. Sesuatu berada pada tempatnya yang benar apabila ia diletakkan secara harmonis dalam kaitannya dengan hal-hal lainnya. Prasyarat untuk mengetahui tempat yang benar adalah ilmu yang benar tentang segala sesuatu. Dari sini, adab berkaitan dengan dua hal, pengenalan dan pengakuan. Pengenalan berarti mengetahui, dan pengakuan berarti bertindak sesuai dengan pengakuan. Di sini makna adab tidak hanya merujuk pada adat sopan santun, melainkan juga pada *right action based on true knowledge*. Apabila setiap orang bertindak sesuai dengan ‘adab’ yang benar, maka akan timbul keadilan (Al-Attas, 1997). Definisi yang ditawarkan oleh al-Attas sangat holistik dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan, adil, beradab, terdapat baik pada konsep yang ditawarkan al-Attas, maupun pada Pancasila. Artinya, yang ditawarkan al-Attas bersifat universal, universal dalam artian dapat diterapkan secara global kepada yang lainnya.

Untuk konteks Indonesia dengan beragam kultur di dalamnya, Pancasila dapat memberikan dasar bagi arah pendidikan republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi penentu arah dan tujuan negara Republik Indonesia, tak terkecuali dalam hal pendidikan (Soekarno, 2018). Soekarno juga menegaskan bahwa Pancasila sebagai *weltanschauung* atau cara pandang. Artinya, Pancasila merupakan sebuah cara pandang yang harus menjadi landasan filosofis bagaimana Indonesia dibentuk. Pendidikan yang juga merupakan sebagai perangkat negara

untuk penanaman ideologi, harus mampu menanamkan nilai-nilai pancasila. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini kemudian dibangun dan dibentuk suatu sistem pendidikan Republik Indonesia. Dengan Pancasila, pendidikan Indonesia diharapkan mampu menghadapi perubahan dan perkembangan Industri. Poin penting yang dijadikan dasar dalam Pendidikan di Indonesia adalah masyarakat Indonesia yang berketuhanan, adil-makmur, dan sosialis (Suparjono, 1966). Secara garis besar, poin-poin di muka adalah nilai-nilai utama yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang juga tidak dapat dilepaskan dari aspek religiusitas. Tidak heran jika pendidikan di Indonesia sangat lekat dengan nilai-nilai keagamaan. Kelebihan dari nilai-nilai keagamaan dalam membentuk pendidikan adalah kemampuannya dalam menanamkan rasa tanggungjawab dan keterpanggilan mengerjakan kebaikan (Whitehead, 1959).

Dari sini, perlu digarisbawahi tujuan utama dari pendidikan. Pendidikan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menciptakan manusia yang baik. Dengan kata lain, pendidikan juga merupakan proses untuk memanusiakan manusia. Manusia pada dasarnya adalah bebas. Apabila luaran dari pendidikan hanya menjadikan manusia yang akan disubordinasi dan direnggut kebebasannya, maka pendidikan belum mencapai tujuan hakikinya. Mempersiapkan warga negara untuk dapat bekerja adalah tujuan baik. Namun sebelum memenuhi tujuan ini, menjadi manusia yang baik adalah hal utama yang harus dipenuhi oleh pendidikan. Warga negara yang baik tidak selalu manusia yang baik. Tapi manusia yang baik dapat dipastikan adalah warga negara yang baik.

PENUTUP

Kampus Merdeka merupakan salah satu program pemerintah yang dibuat oleh Kemendikbudristek dengan bertujuan untuk memberikan peluang bagi mahasiswa dalam perihal mengembangkan potensinya. Melihat kondisi saat ini, dinamika kehidupan sosial yang terus mengalami perubahan dan juga perkembangan teknologi yang semakin canggih telah menuntut manusia untuk beradaptasi dengan zaman yang semakin modern. Tentu hal ini memiliki relevansi terhadap kebutuhan pasar global pada diskursus dunia kerja dan industri. Dampaknya adalah calon pekerja diharuskan memiliki pengalaman, kompetensi dan keterampilan yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Atas dasar fenomena ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan program pendidikan baru yang diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan *soft skills* dan *hard skills* agar bisa bersaing di dunia kerja dan industri dalam taraf nasional maupun internasional. Program-program yang dibuat oleh Kampus Merdeka terbagi menjadi 9 kategori yang disesuaikan dengan minat dan bakat para mahasiswa. Sehingga, mereka memiliki kebebasan untuk menentukan kategori mana yang akan membantu mengasah kemampuannya dalam mencapai karir yang diinginkan. Maka dari itu, program ini bisa dikatakan sebagai sebuah terobosan baru dalam memajukan sumber daya manusia di Indonesia.

Tidak hanya berfokus pada perluasan pengalaman, peningkatan kompetensi dan keterampilan, tetapi Kampus Merdeka juga membangun semangat mahasiswa atau pelajar Indonesia untuk meningkatkan optimistis menggapai karir yang diinginkan. Namun, tujuan lainnya dari Kampus Merdeka adalah menginginkan pelajar Indonesia untuk

tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan bahkan menjadikan itu sebagai pedomannya. Pemerintah menyiapkan berbagai macam program melalui Kampus Merdeka untuk menjadikan pelajar Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin maju, namun tidak melupakan nilai Pancasila dan asas-asas kebangsaan. Melalui penanaman nilai-nilai tersebut dipastikan para pelajar juga dapat meningkatkan kesadarannya agar tetap bersikeras membangun Indonesia yang lebih baik. Generasi muda harus bisa menyeimbangkan antara dunia modern dengan hal-hal yang berkaitan dengan pedoman hidup bangsa supaya bisa meningkatkan sikap nasionalisme. Peluang dari adanya Kampus Merdeka yang akan membuat pelajar khususnya mahasiswa lebih berkompentensi dengan dibarengi nilai Pancasila, hal ini akan melahirkan kesempatan baru untuk terciptanya *interdisciplinary studies*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (1997). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Althusser, L. (2001). *Lenin & Philosophy and Other Essays*. New York: Monthly Review Press.
- Apinino, R. (2022). Gantungkan Kapitalmu Setinggi Langit. *Indoproggress.com*.
- Apriliyani, N. V., Hernawan, D., Purnamasari, I., Goris Seran, G., & Sastrawan, B. (2022). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Jurnal Governansi*, 8(1), 11–18. <https://doi.org/10.30997/jgs.v8i1.5045>

- Bakker, A., & Zubair, A. C. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*.
- Fatiara, N., & Utomo, R. (2021, Oktober 26). Nadiem Sebut 80% Mahasiswa yang Lulus Bekerja Tak Sesuai Prodinya.
- Fisher, M. (2009). *Capitalist Realism: Is There No Alternative*. Zero Book.
- Hasibuan, A. A. (2016). Ta'dib sebagai Konsep Pendidikan: Telaah atas Pemikiran Syed Naquib Al-Attas. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1).
- Hutchins, R. M. (Ed.). (1952). *The Great Books of The Western World* (Vol. 1). Chicago: William Benton.
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Noddings, Nel. (1995). *Philosophy of education*. Westview Press.
- Plato. (2004). *Republic* (C. D. C. Reeve, Ed.). Indiana: Hacket Publishing.
- Romadona, M. T. (2020). Louis Althusser dan Filsafat Sebagai Yang Politis. *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 5(2).
- Soekarno. (2018). *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila Oleh Presiden Soekarno*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Stock, N. (2023). The weird, eerie, exit pedagogy of Mark Fisher. *Pedagogy, Culture & Society*, 31(4).
- Suparjono, E. (1966). *Sistim Pendidikan Nasional Pantjasila*. Jakarta: Penerbit Bhratara.
- Syafe'i, A. (206M). Tujuan Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6.
- Tanduklangi, R. (2020). Analisis Tentang Tujuan Pendidikan Agama Kristen (PAK) Dalam Matius 28:19-20. *PEADA' : Jurnal Pendidikan Kristen*, 1(1), 47–58. <https://doi.org/10.34307/peada.v1i1.14>
- Wasitohadi, W. (2014). Hakekat Pendidikan dalam Perspektif John Dewey: Tinjauan Teoritis. *Satya Widya*, 30(1), 49. <https://doi.org/10.24246/j.sw.2014.v30.i1.p49-61>
- Whitehead, A. N. (1959). The Aims of Education. *Daedalus*, 88(1), 192–205.